

Surutnya Signifikansi Masalah Kamboja dan Perubahan-perubahan di Asia Tenggara

Edy PRASETYONO

SELAMA lebih dari satu dekade, sejak invasi Vietnam ke Kamboja pada tahun 1978, Asia Tenggara terpolarisasi dalam dua blok yang saling bertentangan yaitu aliansi diplomatik, politik, dan strategis antara ASEAN-Amerika Serikat-RRC *vis à vis* Vietnam-Uni Soviet. Variabel pokok polarisasi tersebut adalah persepsi ancaman keamanan dari pihak lain karena adanya konflik Kamboja. Masalah Kamboja kemudian muncul sebagai variabel penting yang membentuk pola hubungan internasional di Asia Tenggara.

Sejak tahun 1989 telah terjadi perubahan-perubahan hubungan internasional baik pada tingkat global maupun regional yaitu peredaan ketegangan Amerika Serikat-Uni Soviet, normalisasi hubungan RRC-Uni Soviet, perbaikan hubungan RRC-Vietnam, Vietnam-Thailand, serta normalisasi hubungan diplomatik RRC-Indonesia. Dalam konteks Asia Tenggara adanya perkembangan-perkembangan ke arah peredaan ketegangan demikian akan mempertanyakan apakah masalah Kamboja masih merupakan faktor penting dalam hubungan internasio-

nal di Asia Tenggara? Apakah masih relevan Asia Tenggara terpolarisasi dalam kutub-kutub yang saling bertentangan karena masalah Kamboja? Bagaimanakah wajah hubungan internasional di Asia Tenggara setelah terjadi perubahan-perubahan di atas? Dan terakhir, langkah-langkah apakah yang mungkin akan diambil oleh negara-negara Asia Tenggara, terutama ASEAN, menghadapi perubahan-perubahan di atas? Tulisan berikut dimaksudkan untuk membahas masalah-masalah di atas.

Asia Tenggara Pra 1989: Masalah Kamboja Sebagai Masalah Stabilitas dan Perdamaian di Asia Tenggara

Masalah Kamboja telah menimbulkan perhatian besar dari negara-negara Asia Tenggara dan menyebabkan keterlibatan kekuatan-kekuatan eksternal, terutama Amerika Serikat, Uni Soviet, dan RRC dengan segala kepentingan politik dan strategis mereka di kawasan ini. Masalah Kamboja kemudian menjadi masalah pokok

stabilitas dan perdamaian di Asia Tenggara serta membentuk pola hubungan internasional di kawasan ini.

Pentingnya masalah Kamboja bagi perdamaian dan stabilitas Asia Tenggara ialah karena masalah ini mempunyai tiga dimensi yang saling terkait. Pertama, dimensi domestik. Masalah Kamboja merupakan hasil dari pertentangan politik memperebutkan kekuasaan di antara empat kekuatan di Kamboja, yaitu kelompok Heng Samrin dan Hun Sen, KPLNF yang dipimpin oleh Son Sann, Khmer Merah, dan kelompok Sihanouk. Kedua, dimensi regional. Masalah Kamboja mencerminkan perbedaan perspektif geopolitik, pertentangan historis dan etnis, dan perselisihan masalah keamanan antara Vietnam-RRC, Vietnam-Kamboja, dan Vietnam-Thailand. Ketiga, dimensi internasional. Masalah Kamboja disebabkan oleh hubungan segitiga antara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan RRC. Ketiga negara ini melihat pentingnya distribusi kekuasaan di Asia Tenggara, khususnya di Indocina, sebagai masalah penting yang mempengaruhi kepentingan keamanan mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan konsekuensinya, mereka berusaha untuk memperluas pengaruh di kawasan ini, atau paling tidak mereka berusaha mencegah pihak lain memperoleh kedudukan strategis di kawasan ini.¹

Karena dimensi-dimensi itu masalah Kamboja menjadi masalah penting yang mempengaruhi hubungan-hubungan Vietnam, RRC, dan ASEAN. Karena itu dapat dipahami bahwa usaha-usaha untuk menyelesaikan masalah Kamboja menjadi sangat rumit karena esensi masalahnya tidak hanya

menyangkut persoalan bagaimana masing-masing negara-negara tersebut merumuskan kebijaksanaan mereka mengenai masalah Kamboja, melainkan juga karena kebijaksanaan mereka mengenai masalah Kamboja pun melibatkan kepentingan-kepentingan keamanan dan strategis mereka di Asia Tenggara, khususnya di Indocina.

ASEAN, misalnya, merumuskan kebijaksanaan mengenai masalah Kamboja dengan mengkombinasikan tekanan politik, ekonomi, diplomatik, dan militer terhadap Vietnam. Kebijakan ASEAN pada dasarnya mempunyai tiga elemen dasar. Pertama, isolasi baik secara ekonomi maupun politik terhadap Vietnam dengan menciptakan dan mempertahankan aliansi anti-Hanoi di arena internasional. Kedua, tekanan militer kepada Vietnam tanpa terlibat langsung dalam masalah Kamboja. Langkah ini dilakukan dengan memberikan bantuan kepada kelompok perlawanan anti-Hanoi dan anti-Heng Samrin melalui kerjasama dengan RRC dan Amerika Serikat. Ketiga, melibatkan diri dalam proses perundingan mengenai masalah Kamboja dengan Vietnam.

Walaupun kebijaksanaan ASEAN mengenai masalah Kamboja sesuai dengan strategi RRC, dalam artian baik ASEAN maupun RRC menentang dominasi Vietnam di Indocina, sebenarnya hubungan antara ASEAN dan RRC diwarnai oleh ambivalensi. Di satu pihak karena RRC mendukung Thailand menentang Vietnam, maka ASEAN terlibat dalam kerjasama diplomasi dengan Beijing dalam masalah Kamboja. Di lain pihak, oleh sebagian negara ASEAN RRC masih dilihat dengan rasa curiga karena ambisi regionalnya di Asia Tenggara.

¹Sukhumband Paribatra, "The Challenge of Co-existence: ASEAN Relations with Vietnam in the 1990s" *Contemporary of Southeast Asia*, Vol. 9/2 (September 1987): 40.

ra.² Dengan demikian ambivalensi itu terletak pada peran RRC dalam masalah Kamboja yang selalu menjadi pertimbangan dalam setiap perumusan kebijaksanaan ASEAN mengenai masalah tersebut.

Berbeda dengan kepentingan ASEAN, kepentingan Vietnam dalam masalah Kamboja adalah:³ pertama, menghilangkan ancaman dan usaha-usaha RRC untuk menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara, khususnya di Indocina; kedua, konsolidasi kekuasaan oleh pemerintahan yang bersahabat di Kamboja; ketiga, konsolidasi Indocina di bawah kepemimpinan Vietnam; dan keempat, netralisasi Asia Tenggara. Dalam pandangan Vietnam, masalah Kamboja adalah masalah regional yang disebabkan oleh ambisi RRC untuk menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara. Sebaliknya menurut RRC, masalah Kamboja lahir karena ambisi Vietnam untuk mendominasi Indocina dengan bantuan politik dan militer dari Uni Soviet. Dengan demikian dalam konteks Asia Tenggara secara keseluruhan, masalah Kamboja menjadi isu sentral dalam hubungan-hubungan ASEAN-Vietnam-RRC, di mana persepsi ancaman menjadi isu pokok dalam setiap perumusan kebijaksanaan negara-negara tersebut mengenai masalah Kamboja.

Hubungan-hubungan di antara mereka mengarah pada terbentuknya polarisasi politik dan strategis di Asia Tenggara yaitu kubu Vietnam-Uni Soviet *vis à vis* Amerika Serikat-ASEAN-RRC. Selama lebih dari

satu dekade Asia Tenggara diwarnai polarisasi seperti itu.

Perubahan-perubahan Global dan Regional

Dewasa ini situasi politik global, sejauh yang menyangkut hubungan Amerika Serikat-Uni Soviet, ditandai oleh berakhirnya Perang Dingin. Setelah jatuhnya imperium Soviet di Eropa Timur dua negara adidaya (*superpower*) mengurangi keterlibatan militer mereka yang saling konfrontatif dalam konflik-konflik regional. Amerika Serikat merencanakan untuk menarik pasukannya sebanyak lima belas ribu personel dari Jepang, Korea Selatan, dan Filipina dalam kurun waktu tiga tahun yang akan datang.⁴ Sementara itu Uni Soviet dan RRC telah sepakat mengurangi jumlah pasukan masing-masing yang ditempatkan di sepanjang perbatasan kedua negara tersebut.⁵ Uni Soviet juga telah mengurangi bantuan dan kehadiran militer di Vietnam.⁶

Perkembangan-perkembangan di atas diikuti oleh normalisasi hubungan Uni Soviet-RRC, perbaikan hubungan RRC-Vietnam, penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja, dan inisiatif Thailand untuk mengembangkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara Indocina dan Myanmar yang mendapat sambutan positif dari Vietnam. Dalam konteks Asia Tenggara, perubahan-perubahan itu akan mempertanyakan masalah Kamboja sebagai dasar terciptanya

²Sheldon W. Simon, "The Two Southeast Asias and China: Security Perspectives," *Asian Survey*, Vol. XX-1V/5 (Mei 1984): 526-527.

³C.P.F. Luhulima, "Hubungan ASEAN-Indocina di Tahun 1990-an: Beberapa Skenario," *Analisis* (September-Oktober 1989): 441.

⁴*Jakarta Post*, 21 April 1990.

⁵*Jakarta Post*, 25 April 1990.

⁶Sheldon W. Simon, "The United States and Conflict Reduction in Southeast Asia," *Contemporary of Southeast Asia*, Vol. 12/2 (September 1990): 86.

polarisasi politik dan strategis dalam hubungan internasional di Asia Tenggara. Perubahan-perubahan itu juga akan mempertanyakan apakah masalah Kamboja masih merupakan variabel penting yang mempengaruhi hubungan internasional di Asia Tenggara.

Masalah-masalah di atas penting untuk dikaji karena perbaikan hubungan di antara negara-negara tersebut berlangsung dalam keadaan masalah Kamboja belum selesai. Tampaknya masalah Kamboja tidak lagi dipandang sebagai penghalang dan menjadi syarat perbaikan hubungan di antara mereka, terlepas dari persoalan apakah masalah tersebut telah selesai atau belum.

Fenomena menarik dari perubahan-perubahan yang kini terjadi di Asia Tenggara adalah bahwa masalah Kamboja mulai dipandang sebagai masalah internal Kamboja sendiri, dan mulai disurutkan keterkaitan masalah tersebut dengan persepsi ancaman Vietnam bagi Thailand, ASEAN, dan RRC; persepsi ancaman RRC bagi Vietnam; persepsi ancaman Uni Soviet bagi Asia Tenggara dan RRC melalui Vietnam. Semua pihak yang bertikai dan negara-negara yang berkepentingan kini mengangkat isu Dewan Nasional Tertinggi (SNC - *Supreme National Council*) sebagai isu utama masalah Kamboja. Dengan demikian, polarisasi politik dan strategis yang disebabkan oleh masalah Kamboja menjadi tidak relevan.

Perkembangan terakhir yang menunjukkan surutnya signifikansi masalah Kamboja dalam hubungan internasional di Asia Tenggara adalah pencabutan pengakuan Amerika Serikat terhadap pemerintahan koalisi perlawanan Kamboja (CGDK) di PBB. Pada satu sisi sikap baru Amerika Serikat tersebut disebabkan oleh desakan Kongres dan opini

masyarakat di negara itu tentang kekhawatiran kembalinya Khmer Merah ke tampuk kekuasaan. Namun pada sisi lain, dalam konteks Asia Tenggara, sikap baru Washington itu menunjukkan bahwa polarisasi di Asia Tenggara dalam bentuk aliansi anti Soviet dan anti Vietnam yang selama ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijaksanaan luar negeri Amerika Serikat, ASEAN, RRC tidak dapat dipertahankan. Demikian pula tidak ada lagi *raison d'être* untuk mempertahankan aliansi *de facto* Thailand-RRC untuk menentang Vietnam dan Uni Soviet dalam masalah Kamboja.

Asia Tenggara dan ASEAN dalam Masa Transisi

Surutnya signifikansi masalah Kamboja dan polarisasi Asia Tenggara yang disebabkan oleh masalah tersebut membawa kawasan ini dalam masa transisi yang ditandai oleh kecenderungan untuk menata (memformulasi) hubungan internasional baru. Sampai saat ini belum dapat ditentukan bagaimana pola hubungan internasional di Asia Tenggara pada masa pasca-Kamboja. Variabel-variabel apakah yang akan banyak berperan dalam hubungan internasional baru di Asia Tenggara pada masa yang akan datang?

Tampaknya negara-negara Asia Tenggara dihadapkan pada situasi yang belum pasti (*uncertainty*) di tengah-tengah optimisme meredanya ketegangan di kawasan ini. Hal ini menyebabkan beberapa negara mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap masa depan Asia Tenggara dengan mengubah kebijaksanaan yang selama ini dijalankan. Thailand, misalnya, mulai mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara-

negara Indocina dan Myanmar serta mengubah sikapnya mengenai masalah Kamboja. Indonesia dan RRC kini telah menormalisasi hubungan diplomatik. Amerika Serikat telah mencabut pengakuan diplomatik pada CGDK⁷ dan mulai mengadakan dialog langsung dengan Vietnam dan pemerintahan Phnom Penh. Demikian pula dengan Uni Soviet, Moskow mulai mendekati ASEAN. Sejak tahun 1987 Uni Soviet mendukung gagasan ZOPFAN ASEAN yang sebelumnya selalu ditentang.⁸ Langkah politik ini diikuti dengan pendekatan Moskow untuk menjalin kerjasama ekonomi dengan negara-negara ASEAN. Singapura memutuskan memberi izin kepada Amerika Serikat untuk menggunakan fasilitas militer di negara tersebut. Dan terakhir Brunei merencanakan menjadi anggota FPDA (*Five Power Defense Arrangement*) pada awal dekade 1990-an.⁹

Persoalan sekarang adalah bagaimana menghubungkan perkembangan-perkembangan baru di atas sehingga kita memperoleh gambaran umum tentang hubungan internasional yang kini terjadi di Asia Tenggara.

Usaha menghubungkan dan selanjutnya menganalisis perkembangan-perkembangan baru di Asia Tenggara bukan usaha yang mudah. Hal ini karena kita tampaknya

masih akan dihadapkan pada kejutan-kejutan baru, seperti halnya dengan langkah-langkah antisipasi oleh beberapa negara untuk menghadapi masa depan Asia Tenggara. Dengan demikian diperlukan suatu patokan sebagai kerangka pemikiran untuk menganalisis perkembangan-perkembangan di atas.

Inti dari perkembangan-perkembangan baru di Asia Tenggara adalah pudarnya pola hubungan internasional yang bersifat *bipolar-confrontative* yang tercakup dalam aliansi RRC-Amerika Serikat-ASEAN *vis à vis* Vietnam-Uni Soviet, serta surutnya isu ancaman Vietnam dan Uni Soviet di Asia Tenggara. Baik Uni Soviet maupun Amerika Serikat kini menunjukkan tanda-tanda akan menutup pangkalan militer mereka di kawasan ini. Masa transisi Asia Tenggara yang demikian menjadikan negara-negara di kawasan ini dan kekuatan-kekuatan eksternal yang berkepentingan sangat *concern* mengenai *kevakuman* kawasan yang dapat menyebabkan ketidakstabilan karena tidak ada lagi penyangga atau penjamin kestabilan dan keamanan regional di Asia Tenggara.

Ketidakpastian (*uncertainty*) dan isu kevakuman kawasan mendominasi agenda hubungan internasional di Asia Tenggara pasca-Kamboja. Masalah tersebut melahirkan dan menghangatkan beberapa pemikiran strategis, antara lain tentang keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Asia Tenggara; tentang kemungkinan masuknya kekuatan eksternal yang lain ke Asia Tenggara terutama RRC, Jepang, dan India; dan tentang kemungkinan penciptaan mekanisme kerjasama keamanan di Asia Tenggara.

Dalam kaitan dengan masalah di atas, negara-negara ASEAN melihat kehadiran militer Amerika Serikat sebagai unsur positif

⁷Time, 6 Agustus 1990. 7.

⁸Untuk mendekati negara-negara ASEAN, Uni Soviet, di samping mendukung ZOPFAN, juga memberikan jaminan kepada Filipina bahwa negara tersebut tidak akan menjadi sasaran serangan nuklir walaupun masih terdapat pangkalan militer Amerika Serikat. Lihat *FBIS*, Maret 1988, hal. 19. Dengan sikap baru itu, Moskow dapat melemahkan posisi dominan Amerika Serikat di Asia Tenggara. Lihat Sheldon W. Simon, "ASEAN Security in 1990s," *Asian Survey*, Vol. XXIX/6 (June 1989): 586.

⁹Simon, "ASEAN Security in 1990s," 585.

dalam keseimbangan regional di Asia Tenggara. Walaupun demikian dari mereka enggan secara terang-terangan menyetujui kehadiran militer Amerika Serikat, namun beberapa negara ASEAN yang lain menyediakan fasilitas militer kepada Amerika Serikat. Bahkan Singapura menyetujui memberi izin kepada Amerika Serikat untuk menggunakan fasilitas militer di negara tersebut jika Amerika Serikat mundur dari Filipina.¹⁰

Karena itu masalah yang menjadi perhatian ASEAN bukanlah masalah apakah Uni Soviet akan menarik pangkalan militernya dari Vietnam atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari reaksi dingin ASEAN terhadap isu penutupan pangkalan militer Uni Soviet di Vietnam yang dilontarkan oleh Gorbachev. Yang menjadi perhatian ASEAN adalah jika Amerika Serikat meninggalkan Filipina, maka kekuatan-kekuatan eksternal yang lain terutama RRC, Jepang, dan India akan masuk ke Asia Tenggara mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat.¹¹ ASEAN dan negara-negara Asia Tenggara yang lain tampaknya yakin bahwa Amerika Serikat suatu saat akan menutup pangkalan militernya di kawasan ini. Karena itu perundingan Washington-Manila tentang pangkalan militer Amerika Serikat di Subic dan Clark menjadi isu yang menonjol.

Di tengah-tengah isu kevakuman kawasan, kehadiran RRC dengan kepentingan strategisnya di Asia Tenggara menjadi perhatian negara-negara di kawasan ini, terutama ASEAN. Kekhawatiran mereka adalah mengenai sasaran jangka panjang RRC ter-

hadap kepulauan di Laut Cina Selatan yang masih dalam persengketaan RRC-Vietnam-ASEAN dan kemungkinan hegemoni RRC di Asia Tenggara pada masa yang akan datang. Para analis ASEAN berpendapat bahwa RRC adalah satu-satunya negara yang sampai saat ini belum puas atas *status quo* batas teritorial di Asia Tenggara.¹² Terlebih Malaysia dan Indonesia belum dapat menerima argumen Amerika Serikat pada tahun 1980-an yang menyatakan bahwa bantuan Washington pada RRC dimaksudkan untuk menciptakan perdamaian. Dua negara ASEAN ini berpandangan bahwa perbaikan hubungan RRC-Uni Soviet dan modernisasi militer RRC dengan bantuan Amerika Serikat membuat Beijing dapat bergerak lebih bebas di Asia Tenggara.¹³ Tindakan militer RRC terhadap Vietnam dan pertempuran Laut Cina Selatan pada bulan Maret 1988, di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak memberikan tindakan kongkret, makin memperkuat kekhawatiran ASEAN. Beberapa analis menyatakan bahwa dengan bantuan Amerika Serikat, Angkatan Laut Cina telah membangun kekuatan baik kekuatan kapal selam maupun kapal perang permukaan yang didukung oleh pesawat-pesawat pembom jarak jauh. Sampai pertengahan dekade 1990-an diperkirakan RRC akan mampu merebut kepulauan Spratly.¹⁴ Dalam perspektif ini, bagi negara-negara ASEAN, kehadiran militer Amerika Serikat akan merupakan kekuatan penangkal terha-

¹⁰F.A. Mediansky, "Security Cooperation in South-east Asia and the Pacific Islands in a Multipolar Regional Order," *Korean Journal of Defense Analysis*, Vol. II/1 (Summer, 1990): 85.

¹¹*Far Eastern Economic Review*, 22 Maret 1990, 26.

¹²Muthiah Alagappa, "The Major Powers in South-east Asia", *International Journal*, No. 44 (Summer 1989): 550.

¹³Simon, "The United States and", 91.

¹⁴Michael Richardson, "New Fears of China's Military Power", *Pacific Defense Reporter* (Agustus 1989): 15-16.

dap kemungkinan aksi militer RRC di Laut Cina Selatan pada masa yang akan datang. Atau kalau pada akhirnya Amerika Serikat harus mundur dari Asia Tenggara, ASEAN tetap berharap kekuatan militer Washington tetap bertahan di Pasifik Barat.

Sementara itu pada pihak RRC, surutnya signifikansi masalah Kamboja dalam hubungan internasional di Asia Tenggara yang diikuti dengan memudarnya aliansi strategis Thailand-RRC atas dasar masalah tersebut menyebabkan Beijing berusaha mempertahankan kepentingan politik dan strategis dengan jalan menciptakan hubungan-hubungan baru dengan negara-negara Asia Tenggara, khususnya ASEAN. Hubungan-hubungan baru dengan ASEAN, sebagai kompensasi memudarnya *aliansi de facto* Thailand-RRC, menjadi makin penting ketika secara politik dan ekonomi Uni Soviet mulai mendekati ASEAN. Karena itu dewasa ini RRC gencar melakukan ofensif diplomatik untuk mendekati ASEAN, sebagaimana dilakukan oleh Perdana Menteri Li Peng pada bulan Agustus dan September 1990 yang baru lalu.

Dengan demikian isu kevakuman kawasan telah mendorong negara-negara ASEAN dan RRC untuk saling memodifikasi kebijaksanaannya terhadap yang lain dalam situasi baru di Asia Tenggara. Hal ini diwujudkan dengan tercapainya normalisasi hubungan diplomatik Indonesia-RRC pada tanggal 8 Agustus 1990 dan Singapura-RRC pada tanggal 3 Oktober 1990. Kebijakan-an tersebut lahir sebagai hasil kekuatan tarik-menarik antara kekhawatiran ASEAN terhadap ambisi regional RRC dan kebutuhan RRC untuk menciptakan hubungan-hubungan baru dengan ASEAN pada masa pasca-Kamboja.

Selain terhadap RRC, ASEAN juga memberi perhatian bahwa mundurnya kekuatan Amerika Serikat dari Asia Tenggara akan menyebabkan kehadiran kekuatan laut Jepang untuk mengamankan SLOCs (*Sea Line of Communications*) yang membentang dari Selat Bashi, Asia Tenggara sampai Teluk Parsi di Timur Tengah. Juga diperkirakan Jepang akan menambah kekuatan militernya jika RRC di masa depan mengembangkan kekuatan militer yang besar dan modern, padahal tidak ada lagi kekuatan AS dan US yang dapat mengimbangnya di Asia Tenggara.¹⁵ Menanggapi kekhawatiran ASEAN terhadap Jepang, Perdana Menteri Jepang, Toshiki Kaifu, menyatakan bahwa mundurnya Amerika Serikat dari Asia Tenggara tidak akan menyebabkan Jepang melakukan intensifikasi militernya yang ditujukan ke kawasan Asia Tenggara.¹⁶ Pernyataan Kaifu tersebut berkaitan dengan adanya trauma yang melanda negara-negara Asia Tenggara yang pernah dijajah oleh Jepang pada Perang Dunia II. Sedangkan India yang tampaknya mulai berkembang sebagai kekuatan di Asia akan melihat Samudera Hindia sebagai ruang gerak pengaruhnya yang tentu akan membawa pengaruh pada Asia Tenggara.

Namun demikian kekhawatiran terhadap Jepang masih dipertanyakan dengan alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, tampaknya sangat kecil kemungkinan Armada VII Amerika Serikat akan meninggalkan kawasan Pasifik Barat walaupun Washington menutup pangkalan militernya di Filipina. Kehadiran militer Amerika Serikat di Pasifik

¹⁵Sayidiman Suryohadiprojo, "ZOPFAN dan Kepentingan Maritim Negara-negara Ekstra Regional Asia Tenggara," *Pelita*, 8 Agustus 1990.

¹⁶M. Rusli, "ASEAN Agar Realisasikan ZOPFAN," *Angkatan Bersenjata*, 30 Maret 1990.

Barat dapat berperan sebagai penangkal kemungkinan petualangan militer Jepang, dan juga RRC. Kedua, kekuatan udara dan laut Jepang lebih ditujukan pada perlindungan dan pengamanan kawasan di sekitar Jepang sendiri. Terlebih angkatan lautnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan operasi laut jarak jauh. Ketiga, walaupun negara-negara di Asia Tenggara memberi perhatian serius terhadap besarnya anggaran belanja militer Jepang yang melebihi 4.000 milyar Yen pada tahun 1990, tampaknya mereka yakin bahwa di kalangan politisi dan masyarakat Jepang masih menyimpan kenangan pahit pada waktu Jepang mempraktekkan nasionalisme-militerisme.¹⁷ Bagi negara-negara ASEAN dan Asia Tenggara kemungkinan yang lebih realistis adalah adanya kerjasama antara Jepang dan Amerika Serikat untuk mempertahankan stabilitas Asia Tenggara.

Dalam hubungan dengan masalah ancaman Jepang di masa yang akan datang, RRC tampak sangat vokal. Salah seorang analis menyatakan: "Contrary to the worldwide disarmament talks, the Japanese authority are increasing strength and spare no efforts to develop a high-tech national defence".¹⁸ Selanjutnya pengamat di Xinhua menyatakan: "the obstacles blocking Japan's military expansion have been ... removed and concern over Japan's potential to repeat history cannot help but heighten our vigilance and lead us to launch struggle against it if necessary".¹⁹ Menteri Luar Negeri RRC, Qian Qichen, secara implisit

juga mengakui adanya kekhawatiran RRC terhadap Jepang dan memandang masalah ini sebagai hal penting dalam kebijaksanaan RRC di Asia Tenggara. Selanjutnya dia menyinggung adanya kompetisi RRC-Jepang di Asia Tenggara dan kemungkinan-kemungkinan eskalasi pada masa yang akan datang.

Beijing menyadari bahwa negara-negara ASEAN memandang RRC sebagai potensi ancaman yang lebih besar daripada Jepang, walaupun ASEAN juga tidak mengesampingkan kemungkinan ancaman Jepang terhadap Asia Tenggara pada masa yang akan datang. Dengan mengangkat isu potensi ancaman Jepang di Asia Tenggara, Beijing tampak berusaha mengimbangi dan menetralsir persepsi ancaman RRC yang berkembang di Asia Tenggara, terutama di kalangan ASEAN, sebagai usaha untuk mengadakan kerjasama dengan negara-negara di kawasan ini.

Dalam hubungan dengan kekuatan-kekuatan eksternal seperti RRC, Jepang, Amerika Serikat dan Uni Soviet, ASEAN tampak dihadapkan situasi yang kontradiktif. Pada satu sisi, hubungan baru ASEAN-RRC setelah normalisasi hubungan diplomatik RRC-Indonesia dan RRC-Singapura, menandai kuatnya posisi dan keyakinan ASEAN dalam berhubungan dengan negara-negara besar setelah munculnya peredaan ketegangan antara Amerika Serikat, Uni Soviet dan RRC di Asia Tenggara. Namun pada sisi lain, kini ASEAN dihadapkan pada masalah penting yaitu bagaimanakah situasi interaksi di antara mereka dan bagaimanakah sikap ASEAN terhadap situasi interaksi tersebut pada masa pasca-Kamboja. Hubungan baru ASEAN-RRC dan kompleksitas masalah yang berkaitan dengan hubungan ASEAN, RRC, Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Soviet di Asia Tenggara merupakan

¹⁷Simon, "The United States and". 91.

¹⁸Robert S. Ross, "China's Strategic View of Southeast Asia: A Region in Transition," *Contemporary of Southeast Asia*, Vol. 12/2 (September 1990): 112.

¹⁹Ibid.

momentum baru dan sulit bagi ASEAN.

Selain itu momentum baru yang lain adalah adanya pemikiran ke arah kerjasama yang lebih baik, terutama dalam bidang ekonomi, antara ASEAN, Indocina, dan Myanmar. Vietnam pernah menyatakan keinginannya untuk mengadakan kerjasama ekonomi dengan ASEAN pada tahun 1989. Saat itu Presiden Soeharto menyatakan bahwa ASEAN membuka diri bagi keanggotaan Vietnam dalam ASEAN. Di samping itu pada *Jasa Conference (Japan-Southeast Asia)* dan *Second Southeast Asia Forum* yang diselenggarakan di Malaysia pada tahun 1989 yang lalu, pemikiran ke arah kerjasama ekonomi ASEAN, Indocina, dan Myanmar menjadi masalah utama dalam diskusi para peserta konperensi.²⁰ Dalam kaitan dengan masalah di atas Thailand telah mengambil langkah inisiatif mengadakan hubungan ekonomi dengan Indocina dan Myanmar, yang kemudian membawa implikasi politik dan perubahan kebijaksanaan Thailand mengenai masalah Kamboja.

Opsi Kebijakan Bagi ASEAN: Dimensi Keamanan dan Strategis

Bagaimanapun, bagi ASEAN, dua momentum itu menambah kompleks masalah hubungan internasional di Asia Tenggara pada masa pasca-Kamboja. Ternyata surutnya signifikansi masalah Kamboja, terlepas dari persoalan apakah masalah tersebut akan selesai atau tidak, menjadikan masalah keamanan dalam hubungan internasional di Asia Tenggara lebih rumit. ASEAN pun dipaksa untuk menetapkan prioritas kebijaksanaan. Untuk sementara, ASEAN, kecuali Thailand, kurang bergairah memfokuskan perhatian pada negara-negara Indo-

cina. Bahkan negara-negara ASEAN yang lain merasa keberatan dengan inisiatif Thailand terhadap negara-negara Indocina, karena inisiatif tersebut membawa implikasi politik berupa pengakuan secara *de facto* pada pemerintahan Hun Sen yang selama ini tidak diakui oleh ASEAN. Pada prinsipnya ASEAN mendukung pendekatan ekonomi antara Thailand-Indocina sebagai ujung tombak dan perintis kerjasama ekonomi antara ASEAN-Indocina. Namun dalam pandangan ASEAN, langkah itu harus tidak mensyaratkan pemenuhan tuntutan-tuntutan politik dari pihak Vietnam dan Hun Sen yang akan memperkuat posisi politis dan diplomatik pemerintahan Phnom Penh.

Adanya hubungan baru ASEAN-RRC setelah normalisasi Jakarta dan Singapura dengan Beijing, menunjukkan bahwa ASEAN melihat hubungan dengan RRC lebih penting dan mendesak, terlebih untuk kepentingan keamanan dan strategis. Hanya saja persoalannya apakah hubungan baru ASEAN-RRC tersebut tidak akan mengarah pada munculnya RRC sebagai kekuatan dominan di Asia Tenggara, yang selanjutnya akan semakin memojokkan Vietnam. Hal ini penting diperhatikan sebab masalah-masalah keamanan dan stabilitas Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan dan suasana hubungan RRC, Vietnam, dan ASEAN. Dari bentuk hubungan segi tiga di antara mereka ganjalan yang masih ada ialah bagaimana mendorong terciptanya hubungan baik Vietnam-RRC.

ASEAN dapat menempuh dua jalur untuk mendorong hubungan baik Vietnam-RRC setelah terciptanya hubungan baru ASEAN-RRC. Pertama, menggunakan hubungan baru ASEAN-RRC untuk lebih menekan Vietnam mendekati RRC, atau membiarkan Vietnam terisolasi di Asia Tenggara.

²⁰Lihat *ISIS Focus*, No. 58, Januari 1990.

Langkah ini tentunya akan sangat menguntungkan RRC, baik dalam konteks hubungan RRC-Vietnam maupun dalam konteks Asia Tenggara. Karena itu langkah pertama ini tampaknya kecil kemungkinan dilakukan oleh ASEAN, terutama oleh Indonesia dan Malaysia yang selalu mewaspadai tujuan-tujuan jangka panjang RRC di Asia Tenggara. Kedua, ASEAN mendukung inisiatif Thailand pada negara-negara Indocina sebagai ujung tombak hubungan ASEAN-Indocina. Langkah ini dapat memberikan tekanan baik kepada RRC maupun Vietnam untuk menciptakan hubungan segi tiga yang lebih baik antara ASEAN-Vietnam-RRC. Bagaimanapun RRC tidak akan mengorbankan hubungannya dengan ASEAN hanya untuk sekedar menentang dukungan ASEAN pada inisiatif Thailand terhadap negara-negara Indocina. Dengan adanya hubungan baru ASEAN-RRC, dukungan ASEAN pada inisiatif Thailand tersebut dapat meyakinkan Vietnam akan pentingnya hubungan baik antara Vietnam-RRC. Selain itu, langkah kedua ini dapat dipandang sebagai pengimbang antara hubungan ASEAN-RRC dan hubungan ASEAN-Vietnam. Karena itu, pendekatan Indonesia-Vietnam yang selama ini telah terwujud mempunyai arti strategis di Asia Tenggara.²¹

Pendekatan diplomatik ASEAN kepada RRC pada masa pasca-Kamboja, sebagai

²¹Lihat pernyataan Presiden Soeharto yang menyatakan bahwa Vietnam harus diajak bekerjasama dalam usaha menjaga perdamaian dan ketahanan regional di Asia Tenggara. *FBIS/East Asia-Southeast Asia*, 26 April 1990, hal. 40-41. Sikap Indonesia ini makin kuat ketika Presiden Soeharto mengadakan kunjungan ke Vietnam, sebagai bagian dari kunjungan ke Jepang, RRC, dan Vietnam, pada bulan November 1990. Dengan demikian sangatlah tepat jika dikatakan kunjungan Presiden Soeharto ke Vietnam di atas mempunyai arti strategis di Asia Tenggara, terutama sebagai pengimbang atas ofensif diplomatik RRC pada negara-negara ASEAN.

salah satu upaya ASEAN menghadapi perubahan di Asia Tenggara dan isu kevakuman kawasan setelah mundurnya Amerika Serikat dan Uni Soviet, pada akhirnya mengkhawatirkan berbagai pihak. Mereka khawatir pada masa yang akan datang RRC akan menjadi kekuatan eksternal yang dominan di Asia Tenggara. Dalam perspektif ini kita dapat memahami mengapa Amerika Serikat mencabut pengakuan kepada CGDK dan mulai mengadakan pendekatan dengan Vietnam untuk memacu tercapainya normalisasi hubungan diplomatik kedua negara.²²

ASEAN pada masa pasca-Kamboja menghadapi situasi hubungan internasional yang lebih rumit. Ia dihadapkan pada persoalan bagaimana merumuskan kebijaksanaan untuk menghadapi/menetralisasi kekuatan-kekuatan eksternal, terutama RRC dan Jepang, di tengah-tengah isu kevakuman kawasan setelah mundurnya Uni Soviet dan Amerika Serikat dari Asia Tenggara. Penarikan kekuatan Uni Soviet dari Vietnam dan pengurangan kehadiran kekuatan militer Amerika Serikat dari Asia Tenggara memunculkan friksi di antara negara-negara ASEAN. Hal ini disebabkan karena pada periode pasca-Kamboja kesatuan persepsi keamanan ASEAN tidak lagi dapat didasarkan pada isu ancaman Soviet dan Vietnam.

Sampai saat ini masih terdapat perbedaan persepsi keamanan di kalangan negara-negara ASEAN. Singapura dan Thailand masih memandang Uni Soviet sebagai ancaman terhadap Asia Tenggara dan tetap melihat perlunya kehadiran kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan ini.²³ Di sam-

²²*Time*, 6 Agustus 1990, 7.

²³Sheldon W. Simon, "ASEAN Security Prospects," *Journal of International Affairs*, Vol. 41/1 (1987), 19. Lihat pula *FBIS/East Asia-Southeast Asia*, 24 Mei 1990, 40.

ping itu seperti halnya RRC, Singapura sangat khawatir terhadap kemungkinan kehadiran militer Jepang, seperti yang dikemukakan oleh Lee Kuan Yew, kepada *Le Monde*.

Le Monde: "Do you want the Americans to remain in Southeast Asia"? Lee menyatakan: Yes ... If Americans go, the Japanese will come. Why not maintain the existing balance? Japan's economic and diplomatic initiatives benefit Asia provided Japan remains a U.S. partner in a strategic alliance and provided the U.S. nuclear umbrella extends over the whole region. If Japan leaves that partnership, everything will be different". Selanjutnya ketika ditanyakan: "What worries you most"? Lee mengatakan: "Most the current Japanese leaders do not want Japan to play its own cards again. They prefer to keep the present type of relations, which are comfortable for them and rest of Asia. But a new generation will take over in the next ten years. They do not have the same level of awareness".²⁴ Karena itu Singapura tetap melihat perlunya kehadiran kekuatan militer Amerika Serikat di Asia Tenggara.

Sedangkan Thailand tetap mempertahankan aliansi *de facto* dengan RRC, walaupun sekarang ini Thailand telah memperbaiki hubungan dengan negara-negara Indocina, terutama dengan Vietnam. Manuver Bangkok tersebut, yang kelihatan saling kontradiktif, mengungkapkan sikap skeptis Thailand terhadap peran Amerika Serikat sebagai penjaga keamanan regional di Asia Tenggara, terutama di kawasan Asia Tenggara *mainland*, pada masa yang akan datang.

Dengan memproyeksikan penarikan kekuatan militer AS dari Filipina pada akhir abad ke-20 dan menurunnya bantuan militer dan keamanan AS pada Thailand, Bangkok berpendapat bahwa Washington pada akhirnya akan menarik diri dari keterlibatan konflik-konflik di daratan Asia Tenggara. Dengan mempertahankan aliansi *de facto* dengan RRC dan memperbaiki hubungan dengan negara-negara Indocina, Thailand akan mampu mempertahankan kepentingan keamanannya, jika akhirnya Amerika Serikat meninggalkan Asia Tenggara. Sementara itu Malaysia dan Indonesia berpendapat bahwa pada saat ini, dengan adanya perubahan-perubahan di Asia Tenggara dan munculnya isu kevakuman kawasan karena mundurnya kekuatan Amerika Serikat dan Uni Soviet, konsepsi ZOPFAN memperoleh momentum yang tepat untuk diwujudkan.

Perbedaan pendapat di antara negara-negara ASEAN mengenai keputusan Singapura memberikan fasilitas militer kepada Amerika Serikat adalah contoh adanya friksi di antara mereka. Thailand adalah satu-satunya negara ASEAN yang secara terbuka mendukung keputusan Singapura dan pada tingkat tertentu Brunei tampaknya mempunyai sikap yang sama dengan Thailand; Malaysia menentang; sedangkan Indonesia lebih bersikap *wait and see*, namun akan menentang jika pada akhirnya ditunjukkan untuk mendirikan pangkalan militer di Singapura. Sikap Filipina tidak begitu jelas, namun ada sedikit 'keberatan' karena tawaran Singapura tersebut dapat melemahkan posisi tawar-menawar Manila dalam negosiasi dengan Washington mengenai pangkalan militer Amerika Serikat di Clark dan Subic.

Situasi baru hubungan internasional di Asia Tenggara melahirkan pemikiran-

²⁴ FBIS/East Asia-Southeast Asia, 24 Mei 1990, 40. Lihat pula "Security Role Not for Japan," FBIS/East Asia-Southeast Asia, 11 Mei 1990, 38-39.

pemikiran strategis untuk menjajagi kemungkinan penciptaan kerjasama keamanan di kawasan ini. Bagaimanakah bentuk kerjasama keamanan itu dan apakah perlu melibatkan pihak lain di luar ASEAN masih menjadi perdebatan. Namun yang pasti, masalah kerjasama keamanan di Asia Tenggara baru pertama kali ini menjadi bahan pembicaraan di kalangan negara-negara ASEAN sejak organisasi ini dibentuk pada tahun 1967.

Malaysia tampak sangat tertarik pada bentuk kerjasama keamanan ASEAN, hanya jika Singapura menarik kembali tawarannya kepada Amerika Serikat yang dipandang sebagai pelanggaran atas prinsip ZOPFAN.²⁵ Demikian pula dengan Indonesia. Indonesia, melalui Menteri Pertahanan L.B. Moerdani, menekankan pentingnya negara-negara ASEAN mengembangkan industri pertahanan regional. Kerjasama seperti itu dipandang sebagai langkah menuju pembentukan kerjasama keamanan multilateral ASEAN. Sementara itu, Menteri Pertahanan Filipina, Fidel Ramos, mengusulkan agar negara-negara ASEAN meningkatkan kerjasama pertahanan untuk mengisi kekosongan jika seluruh pangkalan militer AS di Filipina dipindahkan/ditutup dan mengubah kawasan ini menjadi suatu blok yang kuat untuk mengusir pengganggu-pengganggu asing.²⁶ Ditambahkannya bahwa bagi negara mana pun adalah berbahaya dan tidak realistis untuk mendahulukan kepentingan pertahanan negara asing.²⁷ Pernyataan Ramos tersebut menunjukkan bahwa Filipina mulai kurang menyukai ke-

hadiran pangkalan militer Amerika Serikat di negaranya. Namun demikian, masih sulit diukur apakah sikap baru Filipina tersebut benar-benar merupakan sikap yang prinsipil ataukah sekedar taktik-diplomatik untuk memperoleh penggantian keuangan dari Amerika Serikat seperti yang diinginkan oleh pihak Manila. Selanjutnya, dalam kaitan dengan kerjasama keamanan ASEAN, Malaysia menyatakan perlunya kerjasama patroli laut antara negara-negara ASEAN di Laut Cina Selatan, terutama untuk menghadapi perkembangan masalah klaim kepulauan di Laut Cina Selatan pada masa yang akan datang. Pandangan Malaysia ini senada dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, yang melihat pentingnya kerjasama keamanan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.²⁸ Dalam hubungan dengan masalah ini ada pendapat yang menyatakan bahwa pengembangan kekuatan laut yang kini dilakukan oleh Malaysia, Singapura, dan Indonesia akan menjadi kekuatan penangkal di Laut Cina Selatan jika dioperasikan secara bersama-sama.

Namun, perbedaan persepsi keamanan dan perbedaan pandangan tentang kehadiran kekuatan-kekuatan eksternal di kalangan negara-negara ASEAN akan mempersulit upaya untuk mewujudkan kerjasama keamanan di Asia Tenggara. Mungkin hanya Indonesia dan Malaysia yang secara sungguh-sungguh berusaha mewujudkan kerjasama keamanan di Asia Tenggara dalam kerangka ZOPFAN.²⁹ Sementara itu Singapura, Thailand, dan Brunei masih sulit diharapkan mendukung pemikiran Indone-

²⁵FBIS/East Asia-Southeast Asia, 18 Agustus 1989, 36.

²⁶Merdeka, 21 Mei 1990; Antara, 28 Juni 1990.

²⁷Antara, 28 Juni 1990.

²⁸Mochtar Kusumaatmadja, "Time for a Three-Nation ASEAN Defence Arrangement," *Straits Times*, 27 September 1990.

²⁹Simon, "ASEAN Security," 22-23.

sia dan Malaysia tentang ZOPFAN dan tentang kerjasama keamanan di Asia Tenggara. Tampak bahwa negara-negara ASEAN belum mempunyai kesamaan sikap menghadapi situasi vakum setelah mundurnya kekuatan Amerika Serikat dan Uni Soviet dari kawasan. Pada dasarnya perbedaan-perbedaan tersebut berkisar pada masalah apakah negara-negara ASEAN dan Asia Tenggara lainnya akan membentuk kerjasama keamanan di kalangan mereka sendiri atau apakah harus melibatkan/bekerjasama dengan pihak asing.

Jika kerjasama keamanan dipandang oleh ASEAN sebagai salah satu jawaban atas masalah-masalah hubungan internasional di Asia Tenggara pada masa mendatang, kini persoalannya adalah bagaimanakah prospek dari masing-masing alternatif bentuk kerjasama keamanan di atas. Melihat perbedaan-perbedaan pandangan di atas, tampaknya upaya mewujudkan kerjasama keamanan di kalangan negara-negara ASEAN sendiri seperti yang diinginkan oleh Indonesia dan Malaysia akan banyak menemui hambatan, terutama dari Singapura, Thailand, dan Brunei. Ketiga negara ini berpendapat perlunya keterlibatan kekuatan eksternal untuk menjamin keamanan Asia Tenggara. Ini berarti, bagi ketiga negara ini, perubahan hubungan internasional di Asia Tenggara justru memperkuat pandangan perlunya mempertahankan kehadiran kekuatan militer asing di kawasan ini, suatu pandangan yang tidak disetujui oleh Indonesia dan Malaysia. Keputusan Singapura menawarkan penggunaan fasilitas militer kepada Amerika Serikat dan rencana Brunei untuk menjadi anggota FPDA adalah contoh dari pandangan di atas. Akibatnya, kini muncul pemikiran lain yaitu pembentukan kerjasama keamanan di Asia Tenggara dengan melibatkan pihak luar, di tengah-

tengah dibangkitkannya kembali ide ZOPFAN. Dalam hal ini model kerjasama keamanan seperti FPDA dimunculkan kembali sebagai bahan pemikiran.³⁰ Dengan melihat kenyataan di atas, maka persoalan yang dihadapi oleh Asia Tenggara, khususnya ASEAN, bukanlah masalah alternatif mana yang harus dipilih di antara dua kutub itu, melainkan bagaimana merumuskan kebijaksanaan dengan memanfaatkan setiap perkembangan atau momentum menuju perwujudan alternatif pertama. Artinya, ASEAN kini berada dalam proses untuk membentuk kerjasama keamanan Asia Tenggara dalam kerangka ZOPFAN, tanpa mengabaikan realitas adanya perbedaan pandangan dan kehadiran kekuatan asing di kawasan ini.

Kebijaksanaan ASEAN harus didasarkan pada pertimbangan bahwa masalah kerjasama keamanan di Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dari masalah-masalah hubungan internasional di kawasan ini. Jikaantisipasi ke depan adalah mundurnya AS dan US dari Asia Tenggara, maka persoalan hubungan internasional di kawasan ini akan banyak tergantung dari hubungan ASEAN, Indocina, dan RRC. Dengan demikian, masalah kerjasama keamanan Asia Tenggara, yang diidealkan dalam bentuk ZOPFAN, harus melibatkan tiga negara Indocina.

PENUTUP

Kerjasama keamanan Asia Tenggara dengan melibatkan negara-negara Indocina mempunyai pengaruh positif, baik pada ASEAN maupun negara-negara di luar ASEAN. Secara berangsur-angsur model

³⁰Phillip Methven, "Five Power Defence Arrangements: Pact Relevant to the Security of Southeast Asia," *Straits Times*, 25 Oktober 1990.

kerjasama seperti itu akan mengurangi persepsi ancaman Vietnam pada negara-negara ASEAN, terlebih Uni Soviet telah mulai meninggalkan Vietnam. Jika ini berjalan, tidak ada alasan bagi Filipina dan rencana Singapura untuk meneruskan kehadiran AS di Asia Tenggara; bagi Thailand untuk mempertahankan aliansi *de facto* dengan RRC; dan bagi Brunei untuk menjadi anggota FPDA, dengan alasan akan terjadi kevakuman penjaga stabilitas regional di Asia Tenggara. Kerjasama keamanan Asia Tenggara seperti itu dapat berperan sebagai penangkal ekspansi kekuatan eksternal ke kawasan ini. Dan yang terpenting kerjasama itu juga berperan sebagai pengimbang ofensif diplomatik RRC, sehingga RRC tidak akan menjadi kekuatan dominan setelah mundurnya AS dan US dari Asia Tenggara. Karena itu ASEAN perlu segera merangkul Indocina, khususnya Vietnam, setelah suksesnya ofensif diplomatik RRC ke ASEAN baru-baru ini.

Pendekatan ASEAN pada Indocina akan memberikan tekanan pada RRC untuk memperbaiki hubungan dengan Vietnam. Jika RRC tidak bersedia memperbaiki hubungan dengan Vietnam dalam situasi baru di Asia Tenggara, sebagaimana dilakukan oleh ASEAN, maka akan muncul kembali persepsi dan kecurigaan pada RRC sebagai ancaman jangka panjang terhadap Asia Tenggara. Tentu hal ini merugikan upaya Beijing mendekati negara-negara Asia Teng-

gara. Karena itu ASEAN perlu mendukung kebijaksanaan baru Amerika Serikat untuk menormalisasikan hubungan diplomatik Washington-Hanoi. Pendekatan ASEAN-Indocina, sebagai kelanjutan kebijaksanaan Amerika Serikat, akan memperkuat tekanan pada RRC untuk menciptakan hubungan baik dengan Vietnam.

Bagaimana jika ASEAN membentuk kerjasama keamanan eksklusif di kalangan mereka sendiri? Upaya semacam ini akan banyak menemui kesulitan. Pertama, di kalangan negara-negara ASEAN sendiri masih terdapat perbedaan pandangan tentang persepsi ancaman keamanan. Kedua, kalau pun kerjasama keamanan eksklusif ASEAN terbentuk, mungkin akan muncul kecurigaan yang lebih besar oleh pihak RRC dan negara-negara Indocina, terutama Vietnam, akan maksud-maksud ASEAN. Dalam hal ini ASEAN akan dituding mengobarkan kembali polarisasi politik yang bersifat konfrontatif di Asia Tenggara. Dan yang lebih buruk adalah jika kebijaksanaan ASEAN tersebut mempercepat perbaikan hubungan RRC-Vietnam yang dapat mengarah pada penciptaan persekutuan Beijing-Hanoi atas dasar sikap anti-ASEAN. Jadi, ASEAN harus merekayasa hubungan ASEAN dan Indocina yang dapat mempererat hubungan segi tiga ASEAN, Indocina, dan RRC. Inilah kunci pokok masalah-masalah stabilitas dan perdamaian Asia Tenggara.